

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Madura sebagai salah satu pulau di wilayah Indonesia memiliki karakteristik budaya yang khas dan identitas yang kuat. Budaya Madura tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad, membentuk identitas dan pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Salah satu tradisi yang paling menonjol dan kontroversial dalam masyarakat Madura adalah *carok*, yaitu duel atau pertarungan menggunakan senjata tajam berupa celurit yang dilakukan oleh laki-laki Madura untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan (Wiyata, 2006). *Carok* telah menjadi fenomena sosial yang unik dan kompleks, mencerminkan konstruksi maskulinitas dan representasi kekuasaan dalam masyarakat Madura.

Struktur sosial masyarakat Madura, posisi laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki otoritas dan kekuasaan yang dominan. Hal ini selaras dengan filosofi "*Bhuppa'-Bhâbhu'-Ghuru-Rato*" yang menempatkan figur ayah pada urutan pertama dalam hierarki kepatuhan masyarakat Madura (Hefni, 2007). Menunjukkan kuatnya legitimasi budaya terhadap dominasi laki-laki dalam masyarakat Madura. Hierarki ini membatasi ruang perempuan untuk menyuarakan pertimbangan dan pengalaman moralnya, karena keputusan keluarga lebih berlandaskan otoritas dan kehormatan. Dalam perspektif Carol Gilligan, kondisi ini membuat suara moral perempuan cenderung tersisih, meskipun mereka tetap memainkan peran penting melalui etika kepedulian untuk menjaga keharmonisan dan mencegah konflik.

Posisi perempuan dalam struktur sosial masyarakat Madura cenderung berada pada posisi subordinat. Relasi ontologis dalam budaya Madura menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus patuh dan tunduk pada otoritas laki-laki (Hidayat, 2012). Perempuan Madura memiliki peran yang signifikan dalam memelihara nilai-nilai dan norma-norma sosial, termasuk dalam konteks tradisi *carok*. Perempuan Madura sering diposisikan sebagai simbol *prestise* dan kehormatan keluarga yang harus dijaga dan dipertahankan oleh laki-laki (Mardhatillah, 2014). Pola pemukiman tradisional Madura juga memperlihatkan

bagaimana kontrol terhadap perempuan dilembagakan melalui ruang sosial. Penataan rumah, langgar, dan fasilitas publik seperti sumur, teggel, dan tempat mandi secara simbolik menunjukkan kekuasaan laki-laki untuk mengawasi perempuan.

Pengaturan ruang sosial dalam pemukiman tradisional Madura juga menunjukkan bagaimana kontrol terhadap perempuan dilembagakan secara kultural. Penataan rumah, langgar, dan fasilitas publik seperti sumur dan tempat mandi mencerminkan pengawasan ketat terhadap mobilitas perempuan (Bustami, 2005). Menurut Douglas (1966), pembagian ruang suci dan profan memiliki makna simbolik yang mencerminkan struktur moral masyarakat. Dalam konteks Madura, perempuan sering ditempatkan pada ruang yang diawasi, sementara ruang-ruang otoritas sosial dikuasai oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak sepenuhnya dipandang sebagai subjek moral yang otonom, melainkan sebagai bagian dari sistem kehormatan laki-laki.

Konsep kehormatan dalam budaya Madura juga dikonstruksi dari perspektif laki-laki. Perempuan yang patuh, santun, dan menerima otoritas suami dianggap menjaga kehormatan keluarga, sementara perempuan yang dianggap melanggar norma dapat memicu konflik serius. Pandangan ini menempatkan perempuan sebagai objek perlindungan sekaligus objek kontrol, sehingga suara dan pengalaman moral perempuan kerap terpinggirkan (Bustami, 2005). Akibatnya, perempuan sering kali tidak memiliki ruang untuk menyampaikan perasaan, ketakutan, atau pertimbangan etisnya ketika konflik mulai mengarah pada kekerasan seperti carok.

Perempuan tidak diperkenankan keluar rumah tanpa izin laki-laki, dan langgar di bagian barat menjadi pusat kontrol sosial, selain sebagai tempat ibadah. Menurut Douglas (1966), ruang seperti sumur, kamar mandi, dan tempat buang hajat dianggap wilayah “terpolusi”, sedangkan paddesan (tempat wudu) dan langgar merupakan wilayah suci. Pola pembagian ruang ini mencerminkan struktur sosial yang menempatkan perempuan dalam pengawasan ketat dan ruang gerak yang terbatas (Bustami, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial menempatkan perempuan bukan sebagai subjek yang memiliki kebebasan penuh

atas dirinya, melainkan sebagai representasi martabat laki-laki dalam tatanan patriarkal.

Konsep kehormatan di Madura juga dikonstruksi berdasarkan perspektif laki-laki. Seorang istri dianggap tidak terhormat ketika melakukan sesuatu yang menimbulkan kecemburuan suami, sementara perempuan yang patuh, menerima, dan bersikap santun dianggap menjunjung kehormatan keluarga. Pandangan bahwa laki-laki adalah pelindung perempuan menihilkan kemampuan perempuan untuk membela dirinya. Dalam konstruksi budaya ini, perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk, bukan sebagai individu yang memiliki otoritas atas tubuh dan martabatnya sendiri (Bustami, 2005). Posisi simbolik tersebut menjadikan tubuh perempuan kerap dijadikan alasan bagi laki-laki untuk mempertahankan harga diri melalui mekanisme kekerasan, salah satunya melalui praktik *carok* yang masih bertahan di beberapa wilayah Madura.

Relasi gender dalam konteks *carok* menunjukkan dinamika yang kompleks. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi penyebab terjadinya *carok*, terutama ketika terjadi gangguan terhadap istri yang dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap harga diri suami. Sekitar 60% kasus *carok* dipicu oleh persoalan gangguan terhadap perempuan (Wiyata, 2006). Hal ini menunjukkan bagaimana tubuh dan kehormatan perempuan menjadi arena kontestasi maskulinitas antar laki-laki Madura. Perempuan, dalam hal ini, ditempatkan sebagai objek yang perlu dijaga dan dipertahankan kehormatannya, bukan sebagai subjek yang memiliki *agency* atau kekuasaan.

Fenomena *carok* juga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya yang lebih luas, khususnya terkait keberadaan blater (jagoan lokal) dalam dinamika sosial masyarakat Madura. Blater merupakan elite lokal yang memiliki kekuasaan dan pengaruh signifikan dalam masyarakat Madura. Blater adalah sosok yang dihormati dan ditakuti karena kemampuannya dalam melakukan kekerasan, termasuk *carok* (Syamsuddin, 2015). Keberadaan blater dalam struktur sosial masyarakat Madura turut membentuk relasi kuasa yang kompleks, tidak hanya antar laki-laki tetapi juga dalam relasi gender antara laki-laki dan perempuan.

Di Desa Robatal, Kabupaten Sampang, Madura, tradisi *carok* masih relatif kuat

bertahan di tengah arus modernisasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang (2022), tercatat sedikitnya lima kasus *carok* terjadi dalam kurun lima tahun terakhir di Desa Robatal, dengan motif utama berupa persoalan harga diri akibat gangguan terhadap istri. Kondisi ini menunjukkan bahwa *carok* masih berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang diterima oleh masyarakat setempat. Sebagai salah satu daerah yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional Madura, Desa Robatal menjadi lokasi yang menarik untuk mengkaji bagaimana konflik gender termanifestasi dalam tradisi *carok*. Masyarakat tradisional Madura, *carok* tidak hanya dilihat sebagai tindakan kekerasan tetapi juga mengandung nilai keadilan berdasarkan persepsi lokal (Jufri, 2019). Hal ini menunjukkan bagaimana tradisi *carok* telah dinormalisasi dan diterima sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat.

penelitian terdahulu penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konflik gender di Madura berkaitan erat dengan struktur budaya patriarkal. Aminah et al. (2022) menyoroti *carok* sebagai ekspresi dominasi maskulinitas, sementara Mardhatillah (2014) dan Dore (2020) menempatkan perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga dengan ruang gerak terbatas. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung melihat perempuan sebagai objek budaya atau korban struktur patriarki, tanpa menggali secara mendalam pengalaman moral, suara batin, dan pertimbangan etis perempuan dalam menghadapi konflik *carok*.

Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa peran simbolik perempuan tidak hanya dibentuk oleh budaya, tetapi juga digunakan untuk meneguhkan dominasi laki-laki. Namun, fokus kajian yang ada umumnya terpisah: Kristina dan Immanuel (2019), tidak menyoroti budaya Madura secara langsung, sementara (Mardhatillah, 2014) hanya menyoroti perempuan sebagai simbol prestise dalam sistem perjodohan, tanpa membahas konflik terbuka seperti *carok*. Penelitian Aminah et al. (2022), memang membahas *carok* tetapi tetap fokus pada laki-laki sebagai aktor dominasi. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara mendalam mengkaji bagaimana simbol kehormatan perempuan berkaitan langsung dengan konflik terbuka berupa kekerasan fisik dalam tradisi *carok*.

Penelitian ini menggunakan teori dekonstruksi Jacques Derrida sebagai

kerangka teoretis. Dekonstruksi berangkat dari kritik terhadap makna yang dianggap mapan dan stabil dalam teks maupun praktik sosial. Derrida menekankan bahwa makna tidak pernah tunggal dan final, melainkan selalu dibentuk melalui relasi oposisi dan hierarki tertentu (Al-Fayyadl, 2009). Dalam dekonstruksi, oposisi biner seperti laki-laki/perempuan, kehormatan/aib, subjek/objek tidak bersifat netral, tetapi sarat dengan relasi kuasa yang menempatkan satu pihak lebih dominan dibanding pihak lainnya.

. Menurut Al-Fayyadl (2009), dekonstruksi bertujuan untuk membongkar asumsi-asumsi dasar yang selama ini diterima sebagai kebenaran, dengan menunjukkan kontradiksi dan ketegangan makna yang tersembunyi di dalamnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkritisi bagaimana konsep kehormatan dalam budaya Madura dibangun melalui bahasa dan simbol yang meminggirkan perempuan, sekaligus menormalisasi kekerasan sebagai bentuk pembelaan martabat laki-laki.

Dengan menggunakan teori dekonstruksi Derrida, penelitian ini berupaya membongkar makna kehormatan perempuan dalam tradisi *carok*, serta mengungkap bagaimana perempuan direpresentasikan sebagai simbol yang harus dijaga, tetapi sekaligus dikorbankan dalam relasi kuasa patriarkal. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana konstruksi makna tentang perempuan, kehormatan, dan kekerasan bekerja dalam praktik *carok* di Desa Robatal, serta bagaimana makna tersebut dapat dipertanyakan dan ditafsirkan ulang melalui perspektif dekonstruktif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian gender dan budaya dengan menghadirkan pembacaan kritis terhadap tradisi *carok*, serta membuka ruang bagi pemaknaan baru yang lebih adil terhadap posisi perempuan dalam budaya Madura

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perempuan Madura, khususnya istri pelaku *carok* di Desa Robatal, Kabupaten Sampang, agensi dan negosiasi peran perempuan yang tidak sepenuhnya pasif dan bagaimana mereka memanfaatkan posisi simbolik untuk menasihati suami,

mencegah carok, atau meredam konflik demi menjaga kehormatan keluarga ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perempuan Madura, khususnya istri pelaku *carok* di Desa Robetal, Kabupaten Sampang, mengetahui agensi dan negoisasi peran perempuan yang tidak sepenuhnya pasif dan bagaimana memanfaatkan posisi simbolik untuk menasihati suami, mencegah carok, atau meredam konflik demi menjaga kehormatan keluarga.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian gender dan budaya dengan menggunakan pendekatan dekonstruksi Jacques Derrida untuk membaca ulang makna kehormatan, carok, dan posisi perempuan dalam masyarakat Madura. Melalui perspektif dekonstruksi, penelitian ini tidak memandang makna kehormatan sebagai sesuatu yang tunggal, stabil, dan alamiah, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui relasi kuasa dan oposisi makna. Sebagaimana dijelaskan oleh Derrida, makna tidak pernah berdiri sendiri dan final, tetapi selalu hadir dalam relasi dengan makna lain yang disisihkan atau ditekan (Al-Fayyadl, 2009). Dengan demikian, konsep kehormatan dalam tradisi carok dapat dipahami sebagai hasil dari proses pemaknaan yang mengutamakan perspektif maskulinitas dan mengabaikan pengalaman perempuan.

Penelitian ini juga berkontribusi dalam membongkar oposisi biner yang bekerja dalam struktur budaya Madura, seperti laki-laki/perempuan, pelindung/dilindungi, serta terhormat/tidak terhormat. Dalam kerangka dekonstruksi, oposisi tersebut tidak bersifat netral, melainkan selalu mengandung hierarki yang menguntungkan satu pihak dan memarginalkan pihak lain. Al-Fayyadl (2009) menegaskan bahwa setiap oposisi biner selalu menempatkan satu unsur sebagai pusat dan unsur lain sebagai subordinat. Dalam konteks carok, laki-laki diposisikan sebagai subjek kehormatan dan pengambil keputusan, sementara

perempuan direduksi menjadi simbol kehormatan keluarga yang tubuh dan perilakunya diawasi secara ketat. Penelitian ini memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa posisi subordinat perempuan bukanlah kodrat budaya, melainkan hasil dari konstruksi makna yang terus direproduksi.

Penelitian ini memberikan sumbangan teoretis dengan menghadirkan suara dan pengalaman perempuan yang selama ini disenyapkan dalam wacana dominan tentang carok. Pendekatan dekonstruksi memungkinkan peneliti untuk mengungkap aspek-aspek yang tidak diucapkan, ditekan, atau diabaikan oleh narasi budaya arus utama (Al-Fayyadl, 2009). Dalam praktik carok, fokus kajian selama ini lebih banyak diarahkan pada keberanian, harga diri, dan konflik antarlaki-laki, sementara ketakutan, kecemasan, serta pertimbangan moral perempuan jarang dijadikan pusat analisis. Dengan membaca carok melalui pengalaman perempuan, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang konflik budaya dari perspektif yang selama ini terpinggirkan.

Penelitian ini memperluas penggunaan teori dekonstruksi Derrida dalam kajian sosiologi budaya, khususnya pada studi tentang tradisi kekerasan dan relasi gender di masyarakat lokal. Dekonstruksi dalam penelitian ini tidak digunakan sebagai metode filsafat abstrak semata, tetapi sebagai strategi kritik sosial untuk membaca ulang tradisi yang telah dianggap mapan dan wajar. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Fayyadl (2009), dekonstruksi merupakan cara untuk meninjau kembali struktur sosial dan tradisi yang telah dilegitimasi secara kultural. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi carok bukan hanya praktik budaya, tetapi juga arena produksi makna dan legitimasi kekerasan yang berkelindan dengan relasi kuasa gender.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kajian gender dan budaya dengan menawarkan pembacaan kritis terhadap tradisi carok melalui teori dekonstruksi Derrida. Dengan membongkar makna kehormatan yang berpusat pada laki-laki dan menghadirkan pengalaman perempuan sebagai bagian penting dari analisis, penelitian ini membuka ruang konseptual baru dalam memahami konflik gender, kekerasan simbolik, serta posisi perempuan dalam budaya patriarkal Madura.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang dinamika posisi perempuan dalam tradisi *carok* di Desa Robatal, Kabupaten Sampang. Pemahaman ini penting sebagai landasan dalam merancang program pemberdayaan perempuan yang peka budaya dan membuka ruang resistensi untuk mengurangi praktik kekerasan yang dibenarkan atas nama kehormatan. Bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk menyusun kebijakan pembangunan berbasis gender yang mampu menantang tatanan patriarki yang mengekang perempuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Madura tentang pentingnya memaknai kehormatan keluarga tanpa menjadikan perempuan sebagai objek konflik, serta mendorong relasi gender yang lebih setara di tingkat keluarga maupun komunitas.